

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia pada tahun 2012-2015. Periode tahun tersebut dipilih karena, pada tahun tersebut banyak terdapat praktik politik dinasti di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang kepemimpinan daerahnya terindikasi menjalankan praktik politik dinasti.

B. Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tentang daerah yang terindikasi praktik politik dinasti diperoleh dari informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di media massa dan dirangkum secara manual oleh peneliti. Penelitian ini juga menggunakan data Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI (www.bpk.go.id). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester ini juga digunakan untuk mengetahui data tentang jumlah pelanggaran terhadap SPI untuk mengukur tingkat Pengendalian Internal organisasi. Laporan yang diterbitkan BPK RI ini memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi seperti kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap undang-undang, potensi kerugian negara / daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan

administrasi, ketidak hematatan, ketidak efisienan dan ketidak efektifan (BPK RI, 2015).

Selain itu, penelitian ini menggunakan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Setiap tahun Kementerian Dalam Negeri menerbitkan skor EKPPD atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai langkah strategis pemerintah pusat untuk menilai keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sekaligus sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kemendagri, 2014).

C. Teknik Pengambilan Sampel

Pola pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Kautsar, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Profinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia selama periode tahun 2012 - 2015. Dari populasi tersebut, penelitian mengambil sampel dengan kriteria yang digunakan oleh Nuritomo dan Rossieta (2014), yakni:

1. Pemerintah daerah yang terindikasi politik dinasti. Definisi politik dinasti yang digunakan pada penelitian ini adalah politik dinasti dalam lingkup pemimpin eksekutif pemerintah daerah atau kepala daerah (gubernur/bupati/walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota)

2. Jenis pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pemerintah daerah yang memiliki data sesuai dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, daerah yang terindikasi politik dinasti sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak: 36 daerah. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan sampel pembanding, yakni Pemerintah Daerah yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti sebanyak 36 daerah. Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang tergolong kecil dibandingkan daerah yang tidak menjalankan praktik politik dinasti (hanya 6% dari total populasi). Pengambilan sampel pembanding mengacu pada penelitian Irmawati (2015), yakni mempertimbangkan letak geografis daerah dan ukuran daerah yang sebanding dengan sampel yang dipilih.

D. Teknik Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen dari instansi yang bersangkutan.

E. Devinisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen, 2 variabel independen dan 1 variabel intersening. Variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan adalah Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal. Variabel yang memediasi (intervening) hubungan keduanya adalah Akuntabilitas pelaporan.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja merupakan sebuah capaian organisasi dalam menjalankan seluruh tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah merupakan capaian/prestasi yang diperoleh dari menjalankan tugas pelayanan dan mencapai tujuan organisasi (Sijabat, 2016). Ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Unit analisis pada penelitian ini berdasarkan periodisasi tahun kepemimpinan kepala daerah. Penggunaan skor EKPPD sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijumpai dalam penelitian Mustikarini & Fitriyasari (2012), Sudarsana & Rahardjo (2013), Kautsar (2015). Dalam rentang nilai 0-4, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Skor 0 – 1 = Rendah
- b. Skor 1 – 2 = Sedang
- c. Skor 2 – 3 = Tinggi
- d. Skor 3 – 4 = Sangat Tinggi.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Politik Dinasti (PD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

a. Politik Dinasti

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga (Harjanto, 2011). Variable ini diukur menggunakan variabel *dummy* seperti dalam penelitian Nuritomo & Rosieta (2014). Skor “1” untuk daerah yang terindikasi menjalankan politik dinasti pada kepala daerah serta “0” untuk daerah yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti (Irmawati, 2015). Data masa jabatan dan informasi status hubungan kepemimpinan kepala daerah diperoleh dari laporan yang diterbitkan Kemedagri tahun 2015.

b. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sebuah ketentuan baku yang harus dijalankan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai didalam tubuh organisasi agar pemerintahan tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam LHP yang diterbitkan tersebut, BPK menentukan 3 aspek SPI yang diteliti pada setiap pemerintah daerah (Sijabat, 2016). Ketiga aspek tersebut berupa:

a. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- c. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.

Variabel ini diukur menggunakan nilai temuan audit atas Sistem Pengendalian Internal yang dihitung menggunakan rumus skala rasio dari jumlah penegakan SPI. Dihitung menggunakan jumlah pelanggaran atas SPI terhadap jumlah seluruh SPI yang diperiksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

$$SPI = 1 - \frac{\text{Jumlah pelanggaran SPI}}{\text{Total SPI yang diperiksa}}$$

3. Variabel Intervening

Penelitian ini menambahkan variabel intervening menyebabkan perolehan skor kinerja yang baik dari daerah yang menjalankan praktik Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal yang buruk. Variabel ini diukur menggunakan proksi opini audit yang dikeluarkan oleh BPK, diukur menggunakan skala ordinal dari paling rendah sampai tinggi yaitu 1 = Tidak menyatakan pendapat (TMP) , 2 = Tidak Wajar (TW) , 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP) , 4 = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) , 5 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Irmawati, 2015).

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (*mean, median, min, max, standar deviasi, etc*).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji kualitas data terdiri dari uji normalitas, uji multikolenearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi dari uji normalitas ini harus lebih besar dari pada 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas

dilihat dari masing-masing nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 dan nilai tolerance $\geq 0,10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidak samaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, maka dapat diketahui bahwa model regresi tersebut baik (Ghozali,2011). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Apabila sig $> 0,05$ maka tidak terdapat masalahheteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

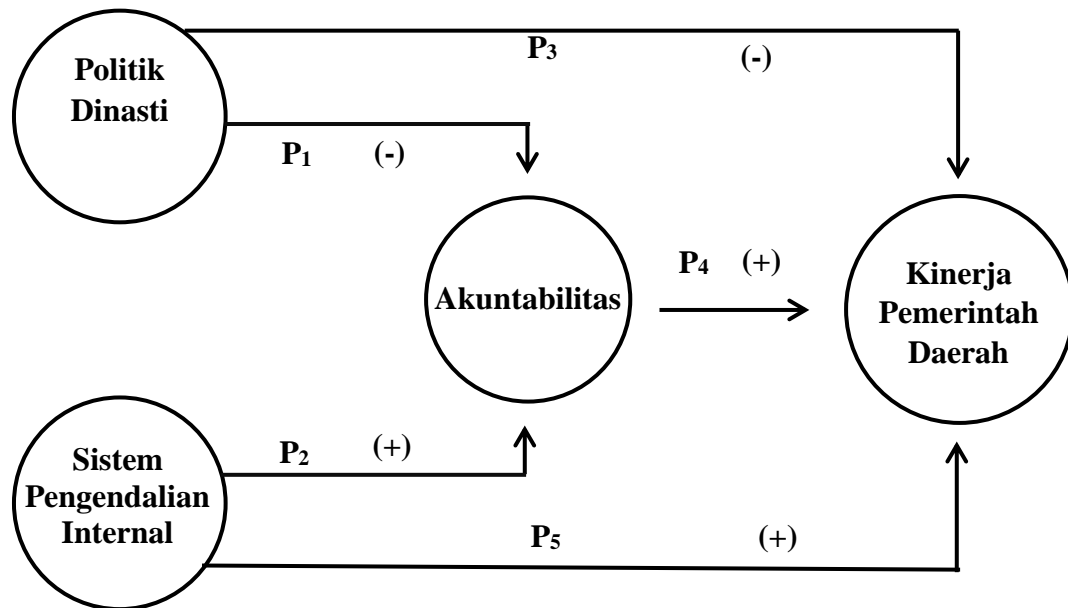
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah *time-series*, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan atau tahunan, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Santoso, 2012). Apabila model regresi bebas dari autokorelasi maka model regresi tersebut dikatakan baik. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin Watson* (D-W). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012):

1) Terjadi autokorelasi positif jika D-W terletak di bawah -2

- 2) Tidak terjadi autokorelasi jika D-W diantara -2 sampai +2
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika D-W terletak diatas +2

G. Uji Hipotesis

Analisis Jalur (*path analysis*)



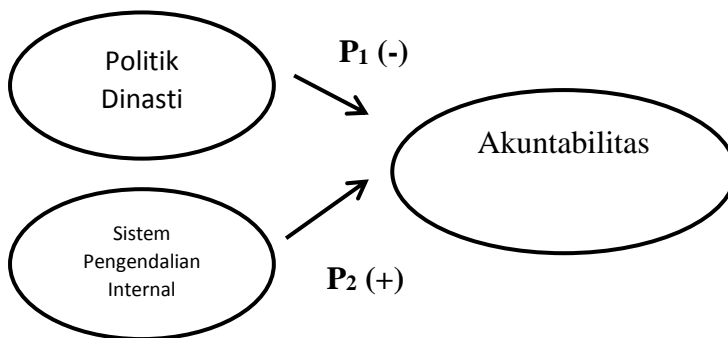
Gambar 3.1
Model Penelitian
Analisis Jalur

Untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , H_5 , H_6 dan H_7 alat uji yang digunakan adalah tehnik analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS) versi 15. Model *path analysis* seperti pada gambar 3.1 di atas. Setiap garis antar variabel mempunyai koefisien *path* untuk mengukur dampak variabel *antecedent I* dalam menjelaskan terhadap variabel *outcome (dependent) j*. Nilai koefisien *path* tersebut dihitung menggunakan analisis regresi (Supriyono, 2004). Analisis jalur untuk menaksir hubungan langsung dan tidak langsung, dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha : 5\%$. Analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk

menaksir hubungan kausalitas antar variabel, apakah ada hubungan langsung atau tidak langsung dari yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Koefisien jalur (*path*) adalah *standardize* koefisien regresi, koefisien jalur dari model penelitian yaitu: P₁, P₂, P₃, P₄, dan P₅ dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yg dihipotesiskan. Persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

Substruktur 1

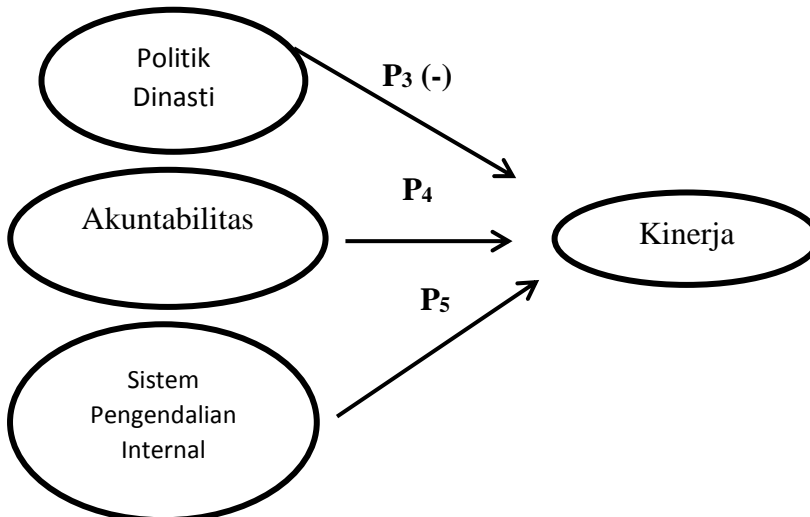
Pengujian hipotesis H₁ dan H₂



$$Y_{Akt} = \alpha + P_1 PD + P_2 SPI + e \dots\dots\dots (H_1 \& H_2)$$

Substruktur 2

Pengujian hipotesis H₃, H₄ dan H₅



$$Y_{KP} = \alpha + P_3 PD + P_4 Akt + P_5 SPI + e \dots\dots\dots (H_3, H_4 \& H_5)$$

Keterangan :

Y_{Akt} = Akuntabilitas Pelaporan Daerah (variabel pemediasi)

Y_{KP} = Kinerja Pemerintah (variabel terikat)

α = Konstanta

P_1 = Koefisien regresi dari PD (variabel bebas)

PD = Politik Dinasti

P_2 = Koefisien regresi dari SPI (variabel bebas)

SPI = Sistem Pengendalian Internal

Akt = Akuntabilitas

P_3 = Koefisien regresi dari PD (variabel bebas)

P_4 = Koefisien regresi dari SPI (variabel pemediasi)

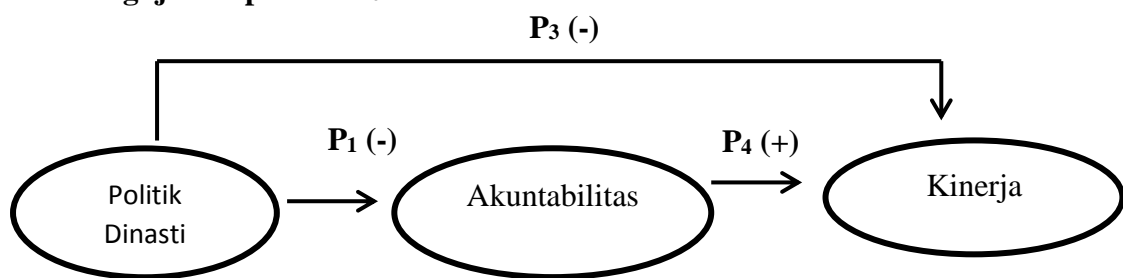
P_5 = Koefisien regresi dari Akt (variabel bebas)

Untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung politik dinasti dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah, maka dilakukan interpretasi terhadap koefisien jalur (*path*). Pengaruh langsung atau tidak langsung dapat terjadi, jika terjadi pengaruh tidak langsung, maka itu berarti pengaruh variabel politik dinasti dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dimediasi oleh variabel akuntabilitas (sebagai variabel *intevening*). diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasarkan pada teori.

Anak panah menunjukkan hubungan antar variabel (Ghozali, 2006). Berdasarkan gambar model alur diajukan hubungan berdasarkan teori bahwa politik dinasti mempunyai hubungan langsung dengan kinerja pemerintah (P_3)

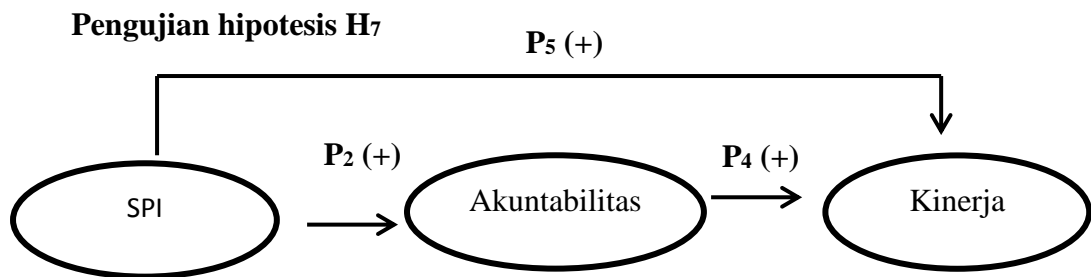
namun demikian juga mempunyai hubungan tidak langsung ke akuntabilitas (P_1) kemudian ke kinerja pemerintah (P_4). Pengaruh Akuntabilitas pelaporan yang memediasi Politik Dinasti ke Kinerja Pemerintah secara tidak langsung terjadi apabila perbandingan pengaruh tidak langsung yaitu koefisien *path* dari Politik Dinasti ke Akuntabilitas yaitu P_1 dikalikan dengan koefisien *path* dari Akuntabilitas ke Kinerja Pemerintah yaitu P_5 lebih besar sama dengan adalah pengaruh langsung Politik Dinasti ke Kinerja Pemerintah (koefisien *path* atau regresi P_3^2).

Pengujian hipotesis H₆



$$(P_1 * P_4) \geq P_3^2 \dots\dots\dots(H_6)$$

Selanjutnya sistem pengendalian internal (SPI) mempunyai hubungan langsung dengan Kinerja Pemerintah daerah yaitu P_5 , namun demikian juga mempunyai hubungan tidak langsung ke Akuntabilitas yaitu P_2 dan kemudian ke Kinerja Pemerintah daerah yaitu P_4 . Pengaruh Akuntabilitas pelaporan yang memediasi SPI ke Kinerja Pemerintah secara tidak langsung terjadi apabila perbandingan pengaruh tidak langsung yaitu koefisien *path* dari SPI ke akuntabilitas yaitu P_2 dikalikan dengan koefisien *path* dari Akuntabilitas ke Kinerja Pemerintah yaitu P_5 lebih besar sama dengan adalah pengaruh langsung SPI ke Kinerja Pemerintah (koefisien *path* atau regresi P_4^2).



$$(P_2 * P_4) \geq P_5^2 \dots\dots\dots(H_7)$$

Baron dan Kenny (1986) menyatakan bahwa suatu variabel berfungsi sebagai variabel *intervening (mediating)* jika : (1) variabel independen secara signifikan ($P \leq 0,05$) berhubungan dengan variabel *mediating*. (2) variabel *mediating* secara signifikan ($P \leq 0,05$) berhubungan dengan variabel dependen. Dan (3) hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menurun setelah dikontrol dengan variabel *mediating*. Pada variabel *mediating* dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu (1) mediasi parsial dan (2) mediasi penuh. Mediasi parsial terjadi jika setelah diperhitungkan variabel *mediating* koefisien regresi hubungan antara variabel independen menurun namun masih signifikan. Mediasi penuh terjadi jika setelah diperhitungkan variabel *mediating* koefisien regresi hubungan antara variabel independen menurun dan menjadi tidak signifikan.